

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali Zainuddin H, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar

Grafika 2009

Ikkal Kederia “ *Strategi Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan di Makasar Dalam mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan* , Skripsi Fakultas Ilmu Sosial 2014

Mamudji et al Sri, *Metode Penelitian Dan Penelitian Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakulda Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal : 30. Dalam skripsi Endah Dwi Purbasari, “ *Analisis Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara*” Depok : 2012

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana 2005

Panji Yuda Prasetya, Adenatera Dwicaksono, Ali Nurman, *Jamkesmas Dan Program Jaminan Kesehatan Daerah*, Bandung : Inisiatif 2012

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta : UI

Pers, 1984

Thabrani Hasbullah, *Jaminan Kesehatan Nasional* Jakarta : Rajawali Pers 2014

Usman Husaini dkk, “ *Metode Penelitian Sosial* “ cet : V (Jakarta: PT Bumi Aksara) hal: 75 Dalam Skripsi Munawir Kadir, *Analisis Yuridis Hubungan Pemerintahan Desa Dan*

Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa, Gowa : 2015

Statistik Kecamatan Koroncong Tahun 2014

Machum Sari Viciawati, *Menuju Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional yang lebih baik*, Jakarta : Pusat Pengajian, Pengelolaan Data dan Informasi Setjen DPRD RI 2012

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta : 2013

Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Jakarta : Kompas 2011

Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyashah Dusturiyah*, Bandung: Pustaka Setia 2012

Usman Cahuur, "Analisis Pengelolaan BPJS Kesehatan dalam prespektif ekonomi islam Studi kasus BPJS Kesehatan Makassar" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2016

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Jakarta 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2013 Tentang jaminan

Kesehatan

Peraturan Presiden Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iura

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Paresiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan

C. Jurnal dan Internet

Adreas G. Ch Tampi, Evelin J.R Kawung Juliana w Tumiwa, 2016, Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu, Jurnal Acta Diurna , vol v no 1

Aulia Rahman pasaribu *“Al Hajat Al Amanah (Kebutuhan Publik) Dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”* Jurnal Az Zarqa, Vol. 11 No. 2

Iswanty Sri Fheriyal, 2015 “ Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1956” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3

Itang, *“BPJS Kesehatan dalam Presfektif Ekonomi Syariah”* , Jurnal Ahkam, Vol XV No 2

Muhammad Tho'in, "*Larangan Riba dalam teks dan konteks (Studi Atas Hadist Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba)*", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 02 No. 02

Nora Eka Putri, 2014, Ektivitas Penerapana Jaminan Kesehatan Nasional Melalui BPJS Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kota Padang, Tingkap Vol. X No 2

prastuti Soewondo, Timbang Besarnya Manfaat dari Salah Sasaran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, Vol 2 no 2

Pupu Saepul Rahmat , 2009 " *Penelitian Kualitatif*" *Equilibrium*, vol 5

Santoso Urip, 2014 "Rekonstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasioanl Bidang Kesehatan Berbasis Nilai Kesejahtraan " Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No 3

Solechan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik, *Administrative Law and Governance Journal*, Vol 2 No 4

<http://www.jamkessnews.com/jamkesnew/berita/detail/nws/3162/20180325/tampil-di-pandeglang-berdaya-bpjs-kesehatan-serang-populerkan-mobile-jkn> diakses pada tanggal 9 Desember 2019

<https://resonansi.id/terungkap-dalam-seminar-lk2p-target-uhc-jkn-kis-di-pandeglang-belum-tercapai/> diakses pada tanggal 8 Desember 2019

<https://www.kabar-banten.com/program-kesehatan-gratis-terbetur-anggaran-kab-kota-belum-mampu-biayai-warga-miskin/> Diakses pada tanggal 9 Desember 2019

<https://id.m.wikipwdia.org/wiki/kesehatan> diakses pada tanggal 9 Desember 2019

<https://bantenhits.com/2018/09/26/25-penderita-stunting-di-pandeglang-tak-memiliki-bpjs/> Diakses pada tanggal 12 Januari 2020

<https://www-sehat-com.cdn.ampproject.org> Diakses pada tanggal 18 Januari 2020

<https://www.jamsosindonesia.com> Diakses pada tanggal 10 Juli 2020

[http://pare.desa.id/2020/02/20/apa-beda-kelurga-miskin-dengan-tidak mampu/](http://pare.desa.id/2020/02/20/apa-beda-kelurga-miskin-dengan-tidak-mampu/) Diakses pada tanggal 13 juni 2020

<http://www.djsn.go.id/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn> Diakses pada tanggal 15 juni 2020

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/11> Diakses Pada Tanggal 19 Juni 2020

<https://bpjs-kesehatan.go.id> Diakses pada tanggal 1 Juli 2020

<http://indonesiabaik.id/infografis/bantuan-bekerja-bagi-masyarakat-desa> Diakses pada tanggal 12 juni 2020

[http://mui.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MU-Hasil-Ijtima-Ulama-V-tahun 2015.pdf](http://mui.or.id/wp-content/uploads/2015/06/MU-Hasil-Ijtima-Ulama-V-tahun-2015.pdf), diakses pada tanggal 13 februari 2021

D. Wawancara

Aden Fauzi, Seksi kesejahtraan sosial kecamatan Koroncong, wawancara di kantornya, tanggal 04 Mei 2020.

Alawiyah, Masyarakat Yang Kurang Mampu Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan Dari Pemerintah, Wawancara pada Tanggal 04 April 2020.

- Dadang, Kepala Puskesmas Bangkonol Kabupaten Pandeglang, wawancara dengan penulis diKantornya pada tanggal 03 November 2020
- Deri, Masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2020
- Enok, Masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan, wawancara pada tanggal 29 Oktober2020.
- Euis Muhimah, Masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan, Wawancara pada tanggal 08 September 2020.
- Eva Herfianti, Staf Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 1 Juli 2020.
- Heni, masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2020.
- Mariam, masyarakat yang kurang mampu yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan, Wawancara pada tanggal 08 September 2020.
- Muhamad Tio Ardianto, Staf perluasan dan kepatuhan BPJS Kesehatan Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 01 Juli 2020.
- Muhamad Yudi, Masyarakat Yang Mendapatkan Jaminan Kesehatan, Wawancara pada Tanggal 08 September 2020.
- Omah, Masyarakat yang kurang mampu yang tidak mendapatkan Jaminan Kesehatan, Wawancara tanggal 04 Mei 2020.
- Reni, Masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan, wawancara pada tanggal 30 Oktober 2020
- Sopi, Masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2020.

IAMPIRAN-LAMPIRAN

Quesioner :

Untuk Masyarakat

1. Apakah Bapak atau ibu tahu apa itu Jaminan Kesehatan ?
atau pemerintah mempunyai program brobat gratis bagi
masyarakatnya ?
2. Bagaimana menurut Bapak atau ibu apakah program itu telah
berjalan dengan lancar ?
3. Apakah ibu sendiri telah merasakan manfaat dari KIS itu ?
4. Bagaimana menurut ibu pelayanan yang didapatkan ! Mulai
dari pemeriksaannya, obat yang didapatkan. dan juga
pelayanan penerimaan ibu sebagai masyarakat yang berobat
menggunakan kartu Indonesia Sehat ?

Questioner :

Untuk Anggota BPJS Kesehatan

Pertanyaan :

1. Sejarah berdirinya BPJS Kesehatan Kabupaten Pandeglang ?
2. Profil BPJS Kesehatan Kabupaten Pandeglang ?
3. Struktur Organisasi ?
4. Bagaimana peran BPJS Kesehatan Ini sebagai penyelenggara JKN ?
5. Apakah kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kabupaten Pandeglang dalam memberikan layanan jaminan kesehatan Bagi Warga miskin dan tidak mampu di Kabupaten Pandeglang ?
6. Dan bagaimana cara mengatasi kendala tersebut ?
7. Bagaimana proses pemilihan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) setelah adanya pendataan dari Dinas Kesehatan ?

Questioner :

Untuk Kepala Puskesmas Bangkonol

Pertanyaan :

1. Apakah banyak masyarakat di kecamatan koroncong ini yang berobat menggunakan kis ?
2. Apa saja penyakit yang sering masyarakat berobatkan ?
3. Bagaimana prosedurnya apabila masyarakat yang mempunyai kartu KIS berobat ke puskesmas dengan mempunyai riwayat penyakit yang parah ?
4. Apakah semua pelayanan kesehatan dan penyakit ditanggung oleh BPJS kesehatan ?
5. Menurut Bapak/Ibu apa kendala bagi masyarakat yang tidak mempunyai KIS dan menggunakan SKTM untuk berobat ?

- 1) Foto bersama Anggota BPJS Kesehatan Kabupaten Pandeglang yaitu Bapak Muhamad Tio Ardianto



- 2) Foto bersama anggota BPJS Kesehatan Kabupaten Pandeglang yaitu ibu Eva Haerfianti



- 3) Foto bersama Bapak Aden Fauzi sebagai seksi kesejahtraan Sosial Kecamatan Koroncong



- 4) Foto bersama Kepala Puskesmas Bangkonol Kecamatan Koroncong Kabupaten Pandeglang yaitu Bapak Ahmad



- 5) Foto bersama Bapak Yudi masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan



- 6) Foto bersama Ibu Euis Muhimah warga tidak mampu yang mendapatkan jaminan Kesehatan



- 7) Foto bersama ibu Alawiyah warga tidak mampu yang mendapatkan jaminan kesehatan



- 8) Foto bersama ibu Rina warga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan



- 9) Foto bersama ibu Heni warga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan



10) Foto bersama Ibu enok warga miskin yang mendapatkan jaminan kesehatan



11) Foto bersama Ibu Mariam warga miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan



12) Foto bersama Ibu Sopi warga miskin yang tidak mendapatkan jaminan Kesehatan



13) Foto bersama Ibu Omah warga miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan



14) Foto bersama Ibu Embay warga miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan



15) Foto bersama Bapak Deri warga miskin yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan

